

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN

Nearumi Raudha¹, Syukriy Abdullah², Darwanis³
nearumir@gmail.com¹, syukriabdullah@usk.ac.id¹, darwanis,fe@usk.ac.id¹

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

ABSTRACT

This systematic literature review aims to determine the influence of local revenue, employee expenditure and capital expenditure on financial independence. This systematic literature descriptive writing method is a library search method sourced from online media such as Google Scholar, Mendeley and other academic media. The results of the following systematic literature observations are 1) Regional Original Income has an effect on financial independence; 2) employee spending affects financial independence; 3) capital expenditure influences financial independence.

Keywords: *Regional Original Income, Employee Expenditures, Capital Expenditures, and Financial Independence.*

ABSTRAK

Tinjauan literatur sistematis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja pegawai dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan. Metode penulisan tinjauan literatur sistematis ini adalah dengan metode library search yang bersumber dari media online seperti google scholar, mendeley dan media akademi lainnya. Hasil tinjauan literatur sistematis ini adalah 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan; 2) belanja pegawai berpengaruh terhadap kemandirian keuangan; 3) belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

Kata kunci: **Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Kemandirian Keuangan.**

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang dimana pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari asas otonomi daerah. Era reformasi memberikan perubahan paradigma yang lebih berkeadilan dan setara (Nurhayati et al., 2022). Perubahan paradigma tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan terpusat dan itu diatur dalam Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan landasan utama otonomi daerah dalam pelaksanaannya, yang pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah, baik dari segi sumber daya manusia, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai aset daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menjadi lebih solid dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Desentralisasi dapat menjadi jembatan penghubung dalam menjalankan kegiatan pemerintah pada tingkat daerah baik kabupaten maupun kota . Berdasarkan Undang-Undang

No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah atau yang sering kali kita kenal dengan desentralisasi merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan otonomi daerah dan juga pemerintahan daerah yang diberikan wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri membuat pemerintah pusat meletakkan harapan bahwa setiap daerah dapat berkembang dan menjadi mandiri dari segala aspek keuangan dan walaupun pada pelaksanaannya pemerintah pusat tetap memiliki andil meskipun wewenang telah diberikan pada masing-masing daerah otonom (Sefira & Budiwitjaksono, 2022)

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat diartikan sebagai seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan sendiri. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila sudah tidak bergantung pada pemerintah pusat, dalam hal ini berarti sebuah daerah dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian dari daerahnya sendiri. Daerah yang mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Kemandirian daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Kustianingsih et al., 2018).

Untuk mengukur kemandirian keuangan suatu daerah adalah dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan hampir mampu dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri apabila tingkat kemandirian yang dihasilkan > 50%, namun faktanya, di Indonesia masih sangat sedikit pemerintah daerah yang termasuk kedalam kategori mandiri secara keuangan (Rivandi dan Anggraini, 2022). Berdasarkan laporan hasil review BPK terhadap kemandirian fiskal daerah pada tahun 2020 terhadap 503 pemerintah daerah yang diketahui, ada sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah atau 88,07% masuk kedalam kategori pemerintahan daerah belum mandiri. Dan hanya terdapat 10 dari 503 pemerintahan daerah atau sekitar 2 % yang masuk kedalam kategori pemerintah daerah mandiri (www.dpr.go.id)

Tabel 1 Daftar 5 Provinsi dengan tingkat Kemandirian terendah di Indonesia Periode tahun 2014-2018

No	Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nangroe Aceh Darusallam	0,1492	0,1688	0,1666	0,1586	0,1635
2	Sulawesi Barat	0,1795	0,1856	0,1566	0,1538	0,1657
3	Maluku	0,2334	0,1856	0,1830	0,1529	0,1515
4	Maluku Utara	0,2334	0,1311	0,1385	0,1439	0,1440

5	Papua	0,0882	0,0773	0,0811	0,0781	0,0779
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber : LH review BPK Atas Kemandirian Fiskal Pemerintahan Daerah Tahun 2020

Bahwa tingkat kemandirian keuangan di Indonesia dari tahun ketahun masih jauh dari yang diharapkan. Ada beberapa provinsi yang memiliki tingkat kemandirian terendah yaitu Nangroe Aceh Darusallam, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua hanya memiliki nilai klasifikasi tidak sampai menyentuh angka 0,25 dan dimana pada Klasifikasi Kemandirian Fiskal berada pada $0,00 \leq IKF \leq 0,25$ dimana disebut dengan kondisi belum mandiri. Maka dalam hal ini mengisyaratkan bahwa rata-rata pemerintahan provinsi memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan dari pemerintahan pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darusallam selama ini penerimaan daerahnya masih mengandalkan dana transfer dari pemerintahan pusat sebagai sumber terbesar bagi penerimaan daerahnya. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat dominan. Dapat dilihat pada table 2 dibawah ini:

Tabel 2 Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Nangroe Aceh Darusallam Tahun Anggaran 2014-2018

No	Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Aceh Barat	0,1151	0,1189	0,1086	0,1042	0,1203
2	Kab. Aceh Barat Daya	0,0792	0,0675	0,0781	0,0785	0,0947
3	Kab. Aceh Besar	0,0979	0,092	0,0764	0,0637	0,0963
4	Kab. Aceh Jaya	0,0542	0,0449	0,0467	0,0525	0,0709
5	Kab. Aceh Selatan	0,0780	0,0715	0,0863	0,0744	0,1116
6	Kab. Aceh Singkil	0,0489	0,0463	0,0467	0,0494	0,0602
7	Kab. Aceh Tamiang	0,1052	0,0901	0,0859	0,0645	0,1197
8	Kab. Aceh Tengah	0,1268	0,1151	0,1020	0,0930	0,1190
9	Kab. Aceh Tenggara	0,0651	0,0487	0,0424	0,0256	0,0727
10	Kab. Aceh Timur	0,0678	0,0645	0,0547	0,0552	0,1053
11	Kab. Aceh Utara	0,1017	0,0978	0,1608	0,0556	0,1029
12	Kab. Bener Meriah	0,0611	0,0707	0,0673	0,0633	0,0773
13	Kab. Bireun	0,1304	0,1043	0,1013	0,0915	0,1024
14	Kab. Gayo Lues	0,0394	0,0436	0,0434	0,0494	0,0567
15	Kab. Nagan Raya	0,0732	0,0777	0,0907	0,0491	0,0989
16	Kab. Pidie	0,1276	0,1217	0,1210	0,1039	0,1224
17	Kab. Pidie Jaya	0,0440	0,0498	0,0459	0,0248	0,0673
18	Kab. Simeulue	0,0534	0,0626	0,0556	0,0485	0,0763
19	Kota Banda Aceh	0,1515	0,1724	0,1956	0,1982	0,2168
20	Kota Langsa	0,1509	0,1383	0,1233	0,1011	0,1504
21	Kota Lhokseumawe	0,0634	0,0677	0,0620	0,0699	0,0876
22	Kota Sabang	0,0813	0,0901	0,0747	0,0852	0,0927
23	Kota Subulussalam	0,0519	0,0547	0,0515	0,0589	0,0691

Sumber : LH review BPK Atas Kemandirian Fiskal Pemerintahan Daerah Tahun 2020

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat Bahwa terdapat 23 kabupaten/kota yang ada di provinsi Nangroe Aceh Darusallam dan dimana tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota

provinsi Nangroe Aceh Darusallam dari tahun ketahun masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan semua daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh memiliki nilai klasifikasi tidak sampai menyentuh angka 0,25 dan dimana pada Klasifikasi Kemandirian Fiskal berada pada $0,00 \leq IKF \leq 0,25$ dimana disebut dengan kondisi belum mandiri. Maka dapat disimpulkan bahwa ketergantungan provinsi aceh terhadap pembiayaan dari pemerintahan pusat sangat besar karena kondisi kemandirian kabupaten/kota di aceh sendiri masih di tahap belum mandiri.

Persoalan kemandirian keuangan pemerintah daerah ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik (fiscal need), sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (fiscal capacity) tidak mencukupi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu sendiri (Kustianingsih et al., 2018).

Hal terpenting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri secara keuangan adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Komposisi pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli daerah dapat menjadi indikator untuk menilai tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Rivandi dan Anggraini, 2022). Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang sumbernya digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah itu sendiri. Jika nantinya struktur pendapatan asli daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat. Maka dari itu di butuhnya struktur industri yang mumpuni beserta objek praja dan retribusi yang taat (Andriani & Wahid, 2019). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rivandi dan Anggraini(2022), Sefira & Budiwitjaksono (2022), Akbar (2022), Rizky et al. (2022), Malau & Simarmata (2020), Andriani & Wahid (2019), dan Gama et al. (2022) menyatakan bahwa pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintahan daerah adalah belanja modal. Dimana dengan melalui otonomi daerah, pemerintahan pusat memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam mengatur anggaran belanja daerah masing-masing daerah yang didalamnya termasuk belanja modal (Rivandi dan Anggraini, 2022). Menurut Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang di alokasikan untuk memperoleh aset tetap dan asset lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) masyarakat terhadap pembangunan yang tercermin dari peningkatan pendapatan layanan publik daerah sehingga berdampak pada kemandirian keuangan daerah (Nurhayati et al., 2022). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rivandi dan Anggraini (2022), dan Nurhayati et al. (2022) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Dan beberapa penelitian terdahulu seperti Akbar (2022), Defitri (2020), Malau & Simarmata (2020), dan Handayani & Erinos (2020) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Faktor Lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah belanja pegawai. Merupakan belanja kompensasi, berupa gaji dan bonus serta penghasilan lain-lain

yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui alokasi belanja pegawai yang memadai, kualitas kinerja perangkat daerah dapat ditingkatkan, sehingga pemenuhan pelayanan kepada Masyarakat dan kemandirian keuangan daerah dapat tercapai Erlina (2015;155) dalam Nurhayati et al. (2022). Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rivandi dan Anggraini (2022), Nurhayati et al. (2022), dan Sefira & Budiwitjaksono (2022). Dan ada beberapa penelitian terdahulu yaitu Defitri (2020) menyatakan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelittian literatur sistematis ini bertujuan untuk melihat dari artiker-artikel terdahulu apakah terdapat pengaruh dari pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan, pengaruh belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan dan pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan. Dan semoga penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat untuk peneliti-peneliti kedepannya dengan menambahkan variabel-variabel yang terbaru seperti dana perimbangan, produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

Kemandirian Keuangan

Berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2014, kemandirian dari keuangan daerah adalah berarti pemerintah di daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan pada daerah bisa kita lihat melalui besar atau pun juga kecilnya dari pendapatan asli daerah tersebut di bandingkan dengan tingkat pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain contohnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat juga berupa pinjaman lainnya (Susanti et al., 2016).

Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam (Ernawati & Riharjo, 2017), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah diartikan bahwa pemerintah dapat mengembangkan sendiri pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya dalam rangka prinsip desentralisasi, dan membangun pemerintahan daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu aliran dana yang sangat dibutuhkan oleh suatu daerah. Setiap daerah akan melakukan pungutan terhadap berbagai sumber daya yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan untuk daerah berdasarkan dengan undang undang yang telah berlaku (Sefira & Budiwitjaksono, 2022). Hal ini sejalan dengan isi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai

perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah bersumber dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen dari belanja daerah yang merupakan sebuah bentuk apresiasi bagi para pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah. (Sefira & Budiwitjaksono, 2022) Belanja pegawai menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan sebuah apresiasi dalam bentuk kompensasi baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada para pejabat pemerintah, pegawai negeri sipil, pegawai honorer dan juga pensiunan atas kontribusi mereka dalam bekerja serta mendukung berlangsungnya fungsi pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Perhitungan belanja pegawai dapat dihitung jika dibandingkan dengan total dari belanja daerah (Defitri, 2020).

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 thn 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal diartikan sebagai pengeluaran yang tujuannya dilaksanakan adalah dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya itu akan menambah aset tetap atau dapat menambah investaris yang mana akan memberikan manfaat melewati dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk juga di dalamnya yaitu pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan yang mana sifatnya untuk mempertahankan dan juga untuk menambah masa manfaat, juga untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas dari aset itu.

Belanja modal jika berdasarkan peraturan mendagri No. 13 tahun 2006 merupakan pengeluaran yang dapat dilaksanakan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan untuk aset tetap yang berwujud yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dapat dipergunakan untuk aktivitas pemerintahan dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. realisasi belanja modal yang tinggi menandakan bahwa pencapaian sarana dan prasarana baik untuk kelancaran dalam pemerintahan maupun dalam pelayanan publik telah mamadai sehingga menarik investor untuk berinvestasi yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dalam daerah itu sendiri. pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan dalam hal belanja modal (Kasdy et al., 2018).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Rivandi, dan Yeyen Anggraini (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan	Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel Independent : Pendapatan asli	Penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara

		daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.	daerah, Belanja Modal	berganda dari data panel dengan bantuan program E-Views 10	parsial. Kemudian variabel Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.
2.	Monica Vidia Putri Sefira dan Gideon Setyo Budiwitjak sono (2022)	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan asli daerah dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Jawa Timur 2019-2020.	Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Belanja Pegawai	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan APBD milik kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020 yang ada pada website milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Perolehan sampel dalam penelitian ini didapat melalui teknik purposive sampling sehingga menghasilkan 33 sampel penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja pegawai berpengaruh secara simultan namun tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3.	Akhmad Akbar (2022)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh	Variabel dependent : Kemandirian keuangan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan asli

		Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial dan simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.	Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Belanja Modal	sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus (sampel jenuh) dari 27 sampel kabupaten/kota dengan tahun pengamatan selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 dengan jumlah data pengamatan sebanyak 135 data. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan Eviews 9.	daerah dan belanja modal mampu menjelaskan kemandirian keuangan daerah sebesar 99,36%, sedangkan sisanya sebesar 0,64% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian secara simultan, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
4.	Neni Nurhayati, Dendi Purnama, dan Herma Wiharno (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, belanja pegawai dan	Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif dan

		dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Provinsi Jawa Barat periode 2015-2019.	Independent : Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Dana Perimbangan	kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh atau metode sensus, sebanyak 18 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id). Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Teknik analisis data menggunakan	signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
--	--	--	---	---	--

				regresi data panel.	
5.	Sri Rizky, Chairil Akhyar, dan Husaini (2022)	Penelitian ini mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2020.	Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 154 kabupaten/kota se-Pulau Sumatera. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan Eviews 12.	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2020.
6.	Siska Yulia Defitri (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.	Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel Independent : Belanja Modal, Belanja Pegawai	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan metode pengumpulan data studi dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Faktor belanja modal dan belanja pegawai dalam

					menentukan pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat pada tahun 2016-2017 hanya 12,5%. Hasil ini menunjukkan rendahnya kontribusi belanja modal dan belanja daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat.
7.	Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi Septania Parapa (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.	Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Belanja Modal	Populasi adalah 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2017 dan populasi akan dijadikan sampel. Data diolah dengan menggunakan metode statistik regresi data panel.	Hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
8.	Tri Utari Handayani and Erinos (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal	Variabel dependent : Kemandirian keuangan	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan

		terhadap kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.	Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Belanja Modal Variabel Moderating : Pertumbuhan Ekonomi	metode pengambilan sampel yaitu total sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda dan uji residual untuk uji moderasi.	terhadap kemandirian keuangan daerah, meskipun pengaruhnya hanya sebesar 8,1%. Belanja modal tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan pendapatan asli daerah dan belanja modal dengan kemandirian keuangan daerah.
9.	R.Neneng Rina Andriani, dan Nisa Noor Wahid (2018)	Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015)	Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.	Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan

					berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
10.	Hostaf Prio Da Gama, Rusman Soleman, dan Hartaty Hadady (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara.	Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan	Berdasarkan pemilihan sampel dengan kriteria terpilih 11 pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara atau 55 unit observasi dalam kurun waktu 5 tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada setiap pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (library research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara off line di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah bersumber dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah namun, juga sebagai tolak ukur yang menunjukkan bagaimana kinerja dari pemerintahan daerah yang bersangkutan dalam mengelola keuangan daerah dan juga perkembangan ekonomi yang dapat berdampak pada tingkat kemandirian suatu daerah (Oktavia, 2021). Hal ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Affifah, Riska Afiatul & Rahayu, 2021) dan (Wahyuni, 2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah akan tetapi bertentangan dengan (Puspitasari & Salisa, 2017) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan namun dengan arah negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Keuangan

Belanja pegawai menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan sebuah apresiasi dalam bentuk kompensasi baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada para pejabat pemerintah, pegawai negeri sipil, pegawai honorer dan juga pensiunan atas kontribusi mereka dalam bekerja serta mendukung berlangsungnya fungsi pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Perhitungan belanja pegawai dapat dihitung jika dibandingkan dengan total dari belanja daerah (Defitri, 2020).

Belanja pegawai merupakan suatu bentuk apresiasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari pegawai pemerintahan daerah. Untuk meraih keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu juga didukung dengan adanya suatu komitmen yang baik dari setiap pegawai pemerintahan (Purnamasari & Rodiyah, 2017). Belanja pegawai dapat menjadi suatu apresiasi bagi para pekerja namun jika pengalokasiannya tidak tepat atau terlalu banyak dapat menyebabkan penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebab nilai belanja daerah akan bertambah (Wahyuni, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2018) dan (Defitri, 2020) bahwa belanja pegawai tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan namun berpengaruh secara simultan dengan arah pengaruh negatif akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2016) yang mengemukakan bahwa belanja pegawai mempunyai pengaruh secara positif tetapi tidak signifikan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan

Setiap kenaikan Belanja Modal akan menyebabkan penurunan pada Kemandirian Keuangan Daerah. Apabila anggaran belanja modal suatu daerah besar dan tidak dimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan dibiayai oleh dana alokasi umum yang bersumber dari pemerintah pusat. Hal inilah yang akan menyebabkan pemerintah daerah ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan tidak bisa mandiri secara finansial (Rivandi dan Anggraini, 2022).

Belanja Modal harus memperhatikan Kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengalokasian asset tersebut dalam jangka panjang (Karyadi, 2017). Berdasarkan Teori ini pemerintah daerah dituntut untuk

dapat melakukan penganggaran yang optimal sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penganggaran. Dalam menganggarkan belanja modal, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah nya. Hal ini akan berdampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut, karena apabila kemampuan keuangan daerah tidak mampu untuk membiayai belanja modal, maka pemerintah daerah akan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Akibatnya kemandirian keuangan daerah tidak bisa tercapai. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rivandi dan Anggraini (2022), dan Nurhayati et al. (2022) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Dan beberapa penelitian terdahulu seperti Akbar (2022), Defitri (2020), Malau & Simarmata (2020), dan Handayani & Erinos (2020) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian tinjauan literatur sistematis yang telah di lakukan dapat di simpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah, dengan sumbangan signifikan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. Belanja pegawai, sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai pemerintahan daerah, memiliki dampak terhadap kemandirian keuangan; namun, alokasi yang tidak tepat dapat mengurangi kemandirian tersebut. Selain itu, kenaikan belanja modal dapat mengakibatkan penurunan kemandirian keuangan daerah, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan hasil di antara penelitian terdahulu, yang menegaskan kompleksitas hubungan antar variabel. Dalam keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah yang optimal perlu mempertimbangkan efektivitas alokasi sumber daya keuangan dan dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalaminya dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2022). The Effect Of Regional Native Income And Capital Expenditure On Regional Financial Independence In District /City Governments In West Java Province Year 2016 -2020. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(4), 884–890. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.561>
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.708>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Ernawati, & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531–545.
- Gama, Soleman, & Hadady. (2022). Analysis of the Effect of Regional Original Income and Balanced Funds on Regional Financial Independence in North Maluku Province Local Governments. *Jurnal Economic Resource*, 5(1), 1–9.

- <https://doi.org/10.57178/jer.v5i1.232>
- Handayani, & Erinoss. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>
- Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintahan Daerah Tahun 2020. 1*, 1–14.
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Maryati, U., Yentifa, A., & Andriani, W. (2015). Implementasi Akuntansi Berbasis Akruar Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.100>
- Nurhayati, N., Purnama, D., Nurhandika, A., & Wiharno, H. (2022). *The Effect of Capital Expenditures, Personnel Expenditures and Balancing Funds toward Regional Financial Independence in Regency Governments at West Java*. <https://doi.org/10.4108/eai.2-12-2021.2320303>
- Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Pemerintah, P. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. *Sekretariat Negara*, 2, 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rivandi dan Anggraini. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 20(1), 1–12.
- Rizky, S., Akhyar, C., & Ristati, H. (2022). The Influence Of Local Own-Source Revenue (PAD) On The Financial Independence Of Regencies/Cities Throughout Sumatra Island. *Journal of Management Research, Utility Finance and Digital Assets THE*. <https://jaruda.org>
- Sefira & Budiwitjaksono. (2022). Analisis PAD Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Timur 2019-2020. *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, 23, 938–947. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/46304%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/46304/23223>
- Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2016). *Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)*. 3(3), 3308–3314.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Undang-Undang No 28 Tahun 2009*, 2(5),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. 1*, 1–14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. 1–64.